

PERAN KUBU OPOSISI SIPIL DALAM MENDUKUNG KUDETA MILITER TERHADAP PRESIDEN MURSI TAHUN 2013

A. Alasan Pemilihan Judul

Pergerakan revolusi Timur Tengah masih terus saja terjadi pergolakan. Timur Tengah menjadi pusat permasalahan Dunia Islam pada saat ini, sehingga para ilmuwan hubungan internasional banyak meneliti ataupun menulis tentang pergolakan di regionalnya. Diantaranya yakni pergolakan Mesir atas ketidakpuasan masyarakat sipil mesir terhadap pemerintahan Mursi.¹

Banyaknya revolusi di Timur Tengah termasuk di Mesir, tidak lain dan tidak bukan merupakan keinginan masyarakat sipil untuk menjadikan negaranya lebih baik, mulai dari krisis kepemimpinan dengan gaya otoriter dan tirani, krisis kesejahteraan, krisis ekonomi dan sebagainya.

Oleh karena itu penulis berkesempatan mengajukan judul skripsi yang berjudul "*Peran Kubu Oposisi Sipil Dalam mendukung Kudeta Militer Terhadap Presiden Mursi Tahun 2013*" untuk menjadikan skripsi ini.

Alasan pemilihan judul ini, penulis ingin menkelaskan lebih rasional mengapa judul ini penulis ambil untuk dijadikan judul skripsi, yang telah menjadi

1. *Koran Republika*, "otak-atik angka untuk menggulingkan presiden mursi" senin 22 juli 2013, hal 8.

akar permasalahan Timur Tengah khususnya di negara mesir. Ketebalan permasalahan di mesir sesudah runtuhnya Mubarak memiliki masa depan yang lebih cerah dalam membangun pemerintahan sendiri, akan tetapi seiring berjalanya waktu selama kurang lebih satu tahun, pemerintahan Mesir “digoyang” oleh sekelompok gerakan oposisi sipil diantaranya gerakan Kristen Koptik, sekuler/liberal dan Salafy (Partai An-nur).²

Hal demikian menjadikan penulis untuk mencari permasalahan mesir pada saat ini, karena ketika pasca runtuhnya Mubarak sebagai diktator, gerakan oposisi tersebut sangat giat untuk melancarkan protesnya terhadap rezim militer Mubarak. Akan tetapi penulis mendapat permasalahan mengapa gerakan tersebut sebaliknya ingin kembali terhadap rezim militer.

Kemudian selain itu, penulis melihat ada suatu kejanggalan terhadap Partai An-nur yang berbasis masa Salafy bersatu terhadap dukungan militer Mesir untuk mengkuat Presiden Mesir. Padahal dari segi basis ideology Salafy, memiliki kesamaan yakni menjalankan syariat islam dalam konstitusi Mesir, hal demikian merupakan kesamaan dengan kubu Ikhwanul- Muslimin yang memiliki cita-cita islam sebagai aturan negara.

Hasil dari alasan pemilihan judul ini, maka penulis menemukan masalah hal ini, setidaknya dua masalah, yang pertama, peran partai Demokratik Nasional yang dimobilisasi oleh gerakan Kristen koptik, Sekuler/Liberal yang mendukung

2. *ibid*

kudeta militer terhadap presiden Mesir. Kemudian yang kedua adalah peran Partai An-Nur yang dimobilisasi oleh gerakan Salafy. Padahal kedua kubu tersebut memiliki kesamaan untuk membangun presiden selanjutnya dari sipil dengan cara demokratis dan merivitalisasi pemerintahan yang otoriter. Hal demikian menjadi “pelatuk” permasalahan oposisi dan mampu mendeskripsikan dengan baik pada penulisan skripsi ini.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dibangun oleh penulis adalah, yang *pertama*, untuk sebagai bahan evaluasi bagi pemerintahan Mursi dari kubu IM (Ikhwanul Muslimin), karena dengan mayoritas muslim di Negara Timur Tengah terjadi kudeta yang mana kudeta tersebut didukung oleh massa yang dominan.

Kemudian yang *kedua* adalah, penelitian ini mampu menunjukkan keadaan real bagi rezim Mursi yang berbasis IM. Sehingga Kekuasaan, koalisi, dan politik luar negeri yang dibangun oleh pemerintahan Mursi masih terbilang belum stabil dalam melakukan manuver politik domestik maupun luar negerinya.

C. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan Husni Mubarak saat meninggalnya presiden Anwar Sadat menjadi tolak ukur pembangunan Mesir pada saat itu. Mubarak ditunjuk sebagai wakil presiden pada tahun 1975 setelah pangkatnya naik di jajaran Angkatan Udara Mesir. Di bawah konstitusi Mesir 1971, setelah diangkat menjadi Presiden, Presiden Mubarak memiliki kuasa yang luas atas Mesir. Seiring berjalanya waktu

dia dianggap sebagai seorang diktator, meskipun moderat. Dia dikenal karena posisinya yang netral dalam konflik Israel-Palestina dan sering terlibat negosiasi antara kedua pihak.

Runtuhnya Rezim Husni Mubarak disebabkan oleh kekecewaan rakyat Mesir terhadap rezim tersebut yang otoriter, diktator, anti demokrasi dan ketidak mampuannya membawa rakyat Mesir menuju kesejahteraan. Bahkan para ahli hubungan internasional konsentrasi Dunia Islam berpendapat, pada rezim Husni Mubarak Mesir tidak mengalami kemajuan yang signifikan, bahkan cenderung semakin memburuk.³

Terbukti dengan banyaknya permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi dan sebagainya telah mengindikasikan penyalahgunaan jabatan yang mubarak kuasai dan sekaligus mengingkari amanah rakyat Mesir. Hal demikian menjadikan rakyat Mesir berusaha untuk menumbangkan rezim Husni Mubarak yang sangat diktator dan memantapkan mereka untuk berevolusi apalagi dengan efek domino dari demokratisasi di Tunisia.

Kemudian pada tahun 2010, Mesir kembali bergejolak diantaranya masyarakat sipil bersatu untuk menurunkan rezim Husni Mubarak. Bersatunya seperti kelompok IM (Ikhwanul-Muslimin), Salafy, Kristen Koptik, Liberal/Sekuler, mereka bersatu untuk menentang rezim diktator Husni Mubarak.

3. Tamburaka Apriadi, "*Revolusi Timur Tengah*" Yogyakarta (2011), hal 76

Dengan koalisi sipil tersebut Husni Mubarak lengser karena tidak ada legitimasi bagi rezim itu sendiri.

Revolusi yang terjadi di Mesir tidak memberikan pengaruhnya pada kondisi dalam negeri Mesir, tetapi memberikan pengaruh lain di negara tetangga di kawasan Arab. Misalnya seperti isu perjanjian Camp David kembali mencuat dan terancam dibatalkan. Selain itu kabinet Ramallah palestina bubar setelah perdana menteri nya mengundurkan diri. Perdana menteri Palestina Salam fayyad memang selama ini bersandar pada diktator Husni Mubarak yang dianggap sebagai boneka Zionis dan Amerika Serikat oleh bangsa Palestina.

Mesir telah berevolusi kurang lebih dua tahun silam, tidak mungkin berlangsung tanpa adanya pelembagaan dan pengorganisasian massa. Dalam revolusi tersebut, pihak yang dianggap salah satu promotor berlangsungnya revolusi adalah Ikhwanul Muslimin yang selama ini menjadi oposisi pemerintah. Sejalan dengan keberhasilan IM dalam hal ini dan kemudian mengusung Mursi menjadi presiden tentunya banyak hal yang bisa dijadikan suatu bukti komperhensif.

Runtuhnya rezim Mubarak dimobilisasi IM kemudian bersatunya Salafy, Kristen, liberal/sekuler, memberikan efek yang sangat besar bagi Mesir sendiri dalam proses demokratisasi. Mulai dari adanya pemilihan umum secara demokratis, Mesir memenangkan dengan terpilihnya Presiden Mursi sebagai presiden pertama dari sipil dan sekaligus dari kubu IM (Ikhwanul Muslimin).

Kurang lebih satu tahun berjalanya pemerintahan Mursi, banyak sekali dari kalangan kaum Kristen Koptik, liberal/sekuler (Partai Demokratik Nasional) dan Salafy (Partai An-nur) menentang kepemimpinan Mursi.⁴ Padahal paska revolusi mesir, mereka bersatu dengan IM (Ikhwanul Muslimin) untuk menumbangkan rezim otoriter Husni Mubarak. Sehingga muncullah permasalahan yang dihadapi sekarang paska kudeta dan sesudah kudeta Mursi.

Kontradiksi jalanya demokratisasi di mesir menjadikan para ahli hubungan internasional menilai bahwa, demokratisasi di timur tengah masih “labil” dalam implementasinya, karena masih banyak permasalahan yang itu jauh dari nilai demokrasi. Adanya kebuntuan dan habis fikir oleh para ahli politik, yakni, adanya kudeta militer terhadap presiden yang terpilih secara sah menurut demokrasi sendiri, seharusnya semua kelompok partai dan sebagainya tunduk atas hasil yang dilakukan proses pemilihan umum.

Bersatunya oposisi sipil dalam mendukung turunya Mubarak menjadi tanda sebagai kuatnya koalisi sipil tersebut dalam memukul sistem otoriter di Mesir. Akan tetapi sebelum terjadinya pengunduran diri Mubarak, semua elemen masyarakat bersatu melawan rezim otoriter. Setelah mundurnya Husni Mubarak kemudian diadakanya pemilihan umum Mesir yang mana telah sukses menjadikan Mursi sebagai Presiden Mesir yang sah.

4. *Koran Republika*, “Problem revolusi Mesir”, 10 juli 2013, hal 7

Setelah terjadinya pembentukan pemerintahan baru Mesir dibawah kepemimpinan Mursi, maka telah terjadi koalisi semua elemen partai. Partai Demokratik Nasional dan partai pecahanya berhasil berkoalisi dengan Partai Kebebasan dan keadilan dari Ikhwanul Muslimin. Selama kurang lebih satu tahun kepemimpinan Mursi berjalan dengan koalisi dari berbagai partai mulai dari idiologi sekular, liberal dan sosialis kiri.

Selama berjalanya kepemimpinan satu tahun Mursi selalu diserang oleh kelompok koalisi sendiri mulai dari partai kiri dan tengah. Sehingga terjadi tensi politik antara oposisi dan pemerintah Mursi. Dalam politik tidak ada teman sejati dan lawan yang sejati, akan tetapi kepentingan yang abadi. Sehingga kelompok partai tengah dan kiri yang tadinya berkoalisi dengan Ikhwanul Muslimin melalui Partai Kebebasan dan Keadilan telah berujung mendukung kudeta Militer terhadap Presiden Mursi yang sah.

Dengan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka hal ini sangat penting dalam penulisan judul skripsi. Dengan adanya konflik yang berkelanjutan dalam kepemimpinan Mursi. Kubu Ikhwanul Muslimin memiliki "hasrat" politik demi tercapainya konstitusi islam di dalam negara Mesir, sehingga hal tersebut memiliki efek yang banyak penentangan bagi oposisi sendiri khususnya Salafy yang sampai saat ini penulis mendapat "langkah pragmatis" mengapa salafy mendukung kudeta Mursi yang memperjuangkan konstitusi Islam di Mesir.

D. Rumusan Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan secara singkat sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah yakni: **“Mengapa Koalisi Kubu Oposisi Sipil (Partai Demokratik Nasional), Salafi (Partai An-Nur) dan militer yang semula menjatuhkan Rezim Husni Mubarak tahun 2010, tetapi pada tahun 2013 berbalik meng kudeta terhadap presiden Mursi yang berasal dari Ikhwanul Muslimin?”**

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas pokok permasalahan diatas, penulis menggunakan pendekatan dengan teori Koalisi dan implementasi teori

1. Teori Koalisi⁵

suatu negara yang menganut sistem parlementer multi partai, tidak jauh dalam melakukan suatu koalisi. Pembentukan kekuasaan yang tercermin dari koalisi biasanya memberikan pembagian posisi dalam kesepakatan koalisi tersebut. Koalisi di Negara Mesir telah berangsur selama kepemimpinan Husni Mubarak. Mesir dengan sistem semi-presidensial multipartai membuat suatu koalisi dalam parlemen.

5. Dalam masyarakat plural (heterogenous) dengan sistem multi partai biasanya sulit bagi partai untuk mencapai mayoritas. Jika tidak ada mayoritas parlemen sebuah kabinet akan melakukan koalisi sangat diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Farish Alfad (Bahan Kuliah Demokrasi) UMY slide 1, 2012.

Menurut Arend Lijphart, membagi teori koalisi menjadi lima jenis. Asumsi dasar lima teori tersebut berdasarkan pada spektrum ideologi. Jika dianalogikan dalam sebuah garis lurus partai yang berada bagian kiri garis merupakan partai dengan spektrum ideologi kiri, selanjutnya partai yang berada pada garis kanan merupakan partai dengan spektrum ideologi kanan. Sedangkan partai yang berada di tengah garis adalah partai dengan spektrum ideologi tengah. Artinya semakin ke kiri, sebuah partai semakin sekuler/liberal, sebaliknya, semakin ke kanan sebuah partai semakin religius.

Lihat tabel garis sebuah ideologi partai :



Lima teori koalisi yang diungkapkan oleh Arend Lijphart berdasarkan spektrum ideologi tersebut yaitu:

1. Minimal Winning Coalition.

Asumsi dasar dari teori *Minimal Winning Coalition* adalah, partai-partai politik yang ditarik dalam dalam pemaksimalan kekuatan mereka dalam sistem parlementer, kekuatan berarti partisipasi dalam kabinet dan kekuatan maksimum berarti mempertahankan sebanyak-banyaknya posisi kabinet yang

memungkinkan . Untuk memasuki kabinet, sebuah partai minoritas membuat tim dengan satu atau lebih partai lain, tetapi hal ini menentang pencantuman partai-partai yang tidak perlu dalam koalisi ini karena akan mengurangi bagian/porsi dari menteri-menteri kabinet.⁶

Prinsip dasar ini koalisi ini adalah memaksimalkan kekuasaan sebanyak mungkin untuk memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu. Koalisi tersebut dibentuk tanpa terlalu memperdulikan posisi partai dalam spektrum idiologi.

2. Minimum Size Coalition.

Teori *Minimum Size Coalition* atas dasar asumsi yang sama dari maksimalisasi kekuatan sebagai dari teori *Minimal Winning Coalition*. Tapi dengan mengikuti hal tersebut ketika rasional untuk konklusi logis. Jika partai politik ingin mengeluarkan rekan kerja yang tidak penting dari kabinet koalisi yang bertujuan untuk memaksimalkan tujuan mereka dari kekuatan kabinet, mereka sebaiknya juga mengikuti atau menyukai kabinet didasarkan atas kemungkinan terdekat mayoritas parlemen.⁷

Koalisi ini terbentuk bila suatu partai yang memperoleh suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.

6. Lijphart, "Teori Koalisi" 1984, hal. 48

7. Ibid.Hal. 49.

3. Bargaining Proposition Coalition.

Sebuah ukuran yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk memilih diantara beberapa koalisi yang diprediksi dari teori *Minimal Winning Coalition* yaitu teori *Bargaining Proposition Coalition*. *Minimal Winning Coalition* akan membangun bentuk meliputi partai-partai kecil karena negosiasi dan tawar menawar tentang formasi dari koalisi tersebut karena lebih mudah untuk melengkapi, dan suatu koalisi lebih mudah untuk mempertahankan secara bersama-sama dengan partai lebih sedikit. (Lijphart, 1984 : 49)

Prinsip negosiasi ini adalah memudahkan proses negosiasi dan tawar menawar karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit. Akan tetapi jumlah rekanan koalisi yang sedikit bukan merupakan jaminan bahwa koalisi akan berjalan tanpa gangguan.

4. Minimal Range Coalition

Teori ini membuat asumsi, bahwa koalisi partai sangat masuk akal demi membentuk atau menjaga koalisi diantara partai sehingga tercipta saling menghormati dan menguatkan dalam suatu kabinet.⁸

Dasar koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai berkoalisi membentuk kabinet.

8. *Ibid.*

5. Minimal Connected Coalition.

Asumsi dasar teori ini bahwa partai-partai akan berusaha untuk segera bergabung dengan partai yang berbeda (tetangga mereka) dan yang mendekati partai-partai akan ditambahkan sampai koalisi mayoritas terbentuk.⁹

Dasar berpijak teori ini adalah bahwa partai-partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakannya. Partai-partai akan mencari anggota koalisi dari partai yang terdekat secara ideologis, yang dengan sendirinya tercermin pada orientasi kebijaksanaan partai. Sehingga partai-partai tidak sekedar bergabung untuk merebut kekuasaan, namun juga mempertimbangkan kedekatan kebijakan masing-masing partai.

Terkait dengan hal tersebut, Dengan adanya multi partai, hampir dapat dipastikan tidak akan suatu partai politik yang mampu memenangkan pemilihan umum dengan mayoritas mutlak, bahkan tidak dengan mayoritas sederhana (simple majority). Implikasinya, partai politik yang menang akan sulit membentuk eksekutif yang kuat dan tidak ada alternatif lain kecuali mengadakan koalisi dengan partai politik lain.

Kemudian dari sudut kelembagaan, Cipto,¹⁰ menyatakan bahwa partai politik dituntut untuk memahami makna pemerintahan koalisi sebagai persyaratan mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar dalam sistem multipartai. Koalisi bagi partai

9. *Ibid.*

10. *Dosen mata kuliah demokrasi.* Dalam kuliahnya, semester 5.

politik menjadi agenda yang wajib dilakukan untuk mendapatkan dukungan di parlemen.

Setidaknya ada dua faktor menurut Anas Urbaningrum¹¹, yakni yang *pertama*, Faktor ideologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ideologi atau aliran-aliran politik merupakan faktor yang cukup signifikan bagi terjadinya koalisi politik. Ideologi bisa diartikan warna politik yang bisa dicermati gerak-geriknya melalui tradisi politik yang dikembangkan, sehingga membentuk aliran.

Kemudian yang *kedua*, Faktor kepentingan politik. Partai-partai politik yang berkoalisi atas dasar persamaan kepentingan politik, otomatis akan saling menopang satu sama lain untuk menggulirkan maksud-maksud politik mereka, serta tidak jarang selain hendak menggolkan program politik mereka, koalisi juga dimaksudkan untuk menjegal lawan yang kebetulan telah menjadi *common enemy* (musuh bersama).

Dengan penjelasan teori-teori diatas bahwa, partai politik pada kekuasaan Mursi berjalan, mereka (Oposisi) menegaskan akan membentuk koalisi dalam suatu partai tunggal untuk menentang kubu Ikhwanul Muslimin.¹² Sejak revolusi

11. Seorang Politisi Partai demokrat dalam wawancara Kuliah Umum di UGM. Tgl 24 maret 2013.

12. *Republika Online*, "Koalisi Oposisi Mesir". Ahad 23 desember 2012. diakses pada tanggal 1 agustus 2013.

tahun lalu para petinggi-petinggi Ikhwanul Muslimin yang lebih disiplin mendominasi pemilu dan jajak pendapat.

Terbentuknya Front Keselamatan Nasional (NSF) merupakan sebuah gerakan oposisi yang terdiri dari kaum liberal/sekuler dalam menentang konstitusi yang berlaku di era Mursi. Sebelum terjadinya konstitusi baru yang dibuat oleh tokoh Ikhwanul Muslimin, dari pihak Front Keselamatan nasional (NSF) gerakan sekuler dan Salafy menyetujui adanya amandemen konstitusi, sebelumnya militer mesir membekukan konstitusi yang disetujui melalui referendum pada desember 2012, namun konstitusi yang berlaku di era Mursi dan dibuat oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin ini mengundang kontroversi.¹³

Dalam proses pembuatannya, dua kali kelompok liberal/sekuler melakukan aksi *walk out* sebagai protes terhadap muatan konten islami dalam konstitusi tersebut.¹⁴ Sepanjang pemerintahan Mursi konstitusi tersebut merupakan kebijakan yang paling sering diperdebatkan oleh oposisi. Para penentangny mengatakan, konstitusi tersebut terlalu banyak mengandung konten islami dan memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada pemerintahan Mursi. Konstitusi tersebut dinilai gagal melindungi kebebasan berepresi dan beragama.¹⁵

13. Koran Republika, "Mesir Susun Konstitusi Baru". Selasa, 23 juli 2013, hal 10.

14. *ibid*

15. *ibid*

Sampai saat ini paska kudeta dan setelah kudeta Mursi, gerakan kubu oposisi segera mengatur pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Baradei dalam mengkebiri demokratisasi di Mesir. Peran mereka (oposisi) dan Militer dinilai oleh Uni Eropa, AS dan negara tetangga seperti Turki telah memberikan solusi dengan cara menambah permasalahan bukan mencari solusi permasalahan.¹⁶

F. Implementasi Teori

Adapun implementasi teori Demokratisasi melalui spektrum ideologi Partai politik di Mesir yaitu terdiri dari IM (Ikhwanul Muslimin) Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK), Gerakan Salafy Partai An-Nur (PAN), Gerakan Kubu Sekular Liberal Partai Demokratik Nasional (PDN) dan Front Pembela Bangsa (NSF), Uni Sosial Arab (USA), Gerakan Syi'ah, Yahudi dan Kristen Koptik.

16.Republika Online, "AS mengecam Kudeta Mesir". Tgl 31 juli 2013. diakses pada tgl 1 agustus 2013.

Lihat tabel spektrum di bawah:

KIRI	TENGAH	KANAN
- Front Pembela Bangsa (National Salvation Front) - Uni Sosial Arab (Social Arab Unity)	- Partai Demokratik Nasional (National Democratic Party) - Gerakan Syi'ah - Yahudi - Kristen Koptik	- Ikhwanul Muslimin (Free and justice Party) Partai Keadilan dan Kebebasan. - Salafy (An-Nor Party) Partai An-Nur.

G. Hipotesis

Untuk memberikan jawaban sementara dari latar belakang yang sudah dijelaskan dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada serta dikaitkan dengan kerangka dasar teori dan konsep sebagai acuan, dimana akan dibuktikan lebih jauh pada bagian-bagian selanjutnya pada skripsi ini, maka penulis mengambil hipotesa bahwa, *Peran Kubu Oposisi Sipil Dalam Mendukung Kudeta Militer Terhadap Presiden Mursi Tahun 2013 karena :*

1. Kekuasaan yang dibangun selama Mursi sekaligus sebagai Murabbi, menandakan turunya ekonomi domestik dengan turunya GDP nasional Mesir
2. Terjadinya pergeseran koalisi, sehingga koalisi oposisi sangat sedikit di parlemen dan mereka (oposisi) ingin menyamai kubu pemerintah yakni Ikhwanul Muslimin.

H. Batasan dan Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup waktu dan jangkauan penelitian menjadi objek penulis, serta lokasi itu sendiri guna menambah materi ataupun sumber yang baik dan informatif maupun fakta dilapangan. Adapun jangkauan waktu penelitian adalah selama dari mulai januari 2011 penggulingan Mubarak sampai Juli 2013 kudeta militer yang didukung oleh Partai An-Nur dan Partai Demokratik Nasional Mesir terhadap Mursi.

I. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dan informasi baik itu dari media internet, surat kabar, artikel-artikel ilmiah dan media cetak yakni data sekunder.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis merupakan aspek syarat wajib untuk kaidah penulisan skripsi ataupun penulisan ilmiah, oleh karena itu baik buruknya suatu penelitian akan dinilai dari bagaimana cara menyajikan hasil penelitian tersebut. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah :

Bab ke -I Berisi bagian pendahuluan yang terdiri dari: Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Implementasi Teori, Hipotesa, Batasan dan Jangkauan Penelitian. Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ke-II Berisi dengan pembahasan : Deskripsi Partai Kebebasan dan Keadilan Ikhwanul Muslimin, Partai An-Nur Salafi Mesir sebagai oposisi Sayap Kanan Mesir, Partai Demokratik Nasional, Era Nasser, Era Sadat dan Husni Mubarak. Kerjasama Partai Oposisi dalam Menggulingkan Husni Mubarak.

Bab ke-III Berisi dengan bagian pembahasan: Penulis menjelaskan secara lebih jauh tentang Mursi Memenangkan Pemilu Secara Demokratis. Peran Oposisi Sipil (Partai Demokratik Nasional, Front Penyelamat Bangsa, dan Salafi) Mendukung Kudeta Militer terhadap Mursi. Data Perekonomian GDP Mesir. Selama Kepemimpinan Mursi. Terjadinya Pergeseran Koalisi dengan Data Pemilu Tahun 2012 di Mesir.

Bab ke-IV Mengupas tentang :Peran Semu Partai Demokratik Nasional Mesir Dalam Membangun Demokratisasi Mesir. Pengaruh Sayap Internasional Partai Demokratik Nasional. Peran Semu Partai Salafi An-Nur Terhadap Demokratisasi Mesir. Prilaku Politik Membelot Salafi An-Nur Terhadap Mursi. Perbedaan Politik Antara Partai An-Nur dan Partai Kebebasan dan Keadilan atas Kudeta Mursi. Pengaruh Sayap Internasional Salafi An-Nur.

Bab ke-V ditutup dengan Kesimpulan dengan secara singkat.

Lampiran gambar kejadian di Mesir.

BAB II

KERJASAMA KELOMPOK OPOSISI (IM, SALAFI DAN PARTAI DEMOKRATIK NASIONAL) DALAM MENGGULINGKAN HUSNI MUBARAK

Bab ke-II penulis mengisi dengan pembahasan : Deskripsi Partai Kebebasan dan Keadilan Ikhwanul Muslimin, Partai An-Nur Salafi Mesir sebagai oposisi Sayap Kanan Mesir, Partai Demokratik Nasional, Era Nasser, Era Sadat dan Husni Mubarak. Kerjasama Partai Oposisi dalam Menggulingkan Husni Mubarak.

A. Partai Kebebasan Dan Keadilan Ikhwanul Muslimin

Partai Keadilan dan Kebebasan terlahir dari gerakan dakwah islam di Mesir dipimpin oleh Hasan Al-bana. Hasan Al-Bana memiliki pandangan bahwa dakwah harus memiliki potensi yang menyeluruh terhadap semua sektor kehidupan. Partai Kebebasan dan Keadilan lahir pada tahun 1928 pada saat itu banyak sekali ketimpangan sosial yang mewabahi masyarakat Mesir sendiri. Cita-cita Ikhwanul Muslimin yakni "Hidup Mulia atau Mati syahid". Cita-cita tersebut telah dipromosikan oleh pemimpin terdahulunya yakni Hasan Al-bana dan Al-Maududi, sehingga cita-cita tersebut memiliki kesamaan terhadap baginda Rosulullah SAW.

Ikhwanul Muslimin sangat berpengaruh di Mesir semenjak lahirnya Partai Kebebasan dan Keadilan. Masyarakat Mesir telah menyadari bahwa pentingnya dakwah dalam partai politik. Sehingga terciptalah pemerintahan yang berbasis

nilai-nilai syariat islam dalam membangun suatu negara yang demokratis. Partai kebebasan dan Keadilan menganggap semua sektor kehidupan bernegara dan masyarakat harus dilandasi oleh nilai-nilai islam sehingga dakwah menjadi stir dalam menyebarkan idiologi Ikhwanul Muslimin. Kemudian selain itu, Ikhwanul Muslimin menerima sebuah sistem demokrasi yang berasal dari barat sekalipun demi terciptanya cita-cita Islam.

Selain itu, Ikhwanul Muslimin terlahir untuk menegakan syariat islam yang kaffah dan menolak mutlak sekularisme dan liberalisme. Karena Ikhwanul Muslimin menganggap bahwa sekularisme dan liberalisme merupakan idiologi yang merusak ummat islam karena di dalamnya terdapat sebuah nilai negatif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai islam. Mulai dari pemerinthan nasser, Saddat dan Husni Mubarak, Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu organisasi terlarang dan berbahaya sehingga pada saat tiga periode oleh sistem otoriter, Ikhwanul Muslimin terus diburu dan dibekukan langkah dakwahnya.

Sampai darah penghabisan jihad di jalan Allah. Ikhwanul Muslimin melalui Partai kebebasan dan Keadilan terus-menerus mempromosikan nilai-nilai politik islam yang menyeluruh. Sehingga pada saat sekarang politik dan agama islam telah melekat bagaikan sisi mata uang. Dengan demikian liberalisme dan sekularisme telah menjadi sebuah idiologi yang sangat berbahaya bagi Ikhwanul Muslimin. Dakwah dan pergerakan terus didengungkan oleh Ikhwanul Muslimin demi terciptanya negara yang berbasis agama.

B. Partai An-Nur Salafi Mesir

Partai An-Nur atau dalam bahasa arab yaitu *Hizb Al-Nur* adalah salah satu partai politik Islam yang terbentuk ketika setelah revolusi Mesir tahun 2011. Partai An-Nur memiliki karakteristik dalam idiologi Islam akan tetapi sangat apik dan ketat pada pelaksanaan syariat Islam. Hal demikian bisa disebut dengan idiologi Ultra-Konservatif dan telah digambarkan sebagai lengat politik *Salafy Call Society*.¹⁷ dengan pergerakan tersebut Partai An-Nur memiliki pemimpin kharismatik yang terus mengemborkan dakwah salafisme di Mesir.

Gerakan dakwah yang sangat fundamental bagi partai ini, bertujuan untuk mencegah Mesir dari sistem kafir, artinya sistem yang jauh dari aturan islam. Al-Nur dibentuk setelah revolusi 2011, pada saat itu pemerintahan otoriter militer sementara Mesir memungkinkan pembentukan partai baru. Partai ini didirikan oleh salah satu kelompok Salafy di Mesir. Call Salafy (*Al-Dakwah Salafiyah*), juga dikenal sebagai gerakan Al-Dawaa.¹⁸ Gerakan filosofis Salafy telah dikaitkan dengan literali, pendekatan yang ketat dan puritan Islam.

Gerakan kelompok salafy telah berjalan pada tahun 1970 dan tegas didirikan pada tahun 1980 di Universitas Alexandria setelah banyak mahasiswa menolak untuk bergabung dengan Ikhwanul Muslimin (IM) yang mengarahkan terhadap bentrokan antara salafy dan Ikhwanul Muslimin karena pelembagaan salafy, artinya adanya “gengsi” bagi kedua gerakan islam ini.

¹⁷ The rise of Salafists has complicated Egyptian politics By Omar Ashour, *The Daily Star*, unexpected 6 January 2012

¹⁸ Baker, Abdul Haqq, *Extrimist in Our Midst : Confronting Terror*, Palgrave Macmillan, 2011

Salafy di masa lalu telah menolak untuk mengambil bagian dari politik karena mereka percaya bahwa sistem demokrasi yang ada pada saat ini tidak islami. Meskipun mereka khawatir dengan politik dari sudut pandang Islam yang berkaitan dengan kehidupan harian di Mesir. Selama revolusi pada tahun 2011, mereka dari partai An-Nur masih ambigu dalam mendukung Mubarak untuk turun, dan mereka beranggapan bahwa Amerika Serikat telah memerintahkan Mubarak untuk membantai para demonstran menurut juru bicara partai An-Nur.

Setelah turunya Mubarak artinya revolusi sudah berakhir, Salafy memutuskan untuk mengambil bagian dari politik untuk melindungi identitas Islam Mesir yang berdasarkan Islam Quran dan Sunnah. Seorang Pengkhotbah dari Salafy yakni Yasser Al Borhamy beralih ke sisi partisipasi politik setelah penggulingan Mubarak, dan dia mengatakan “ Islam harus terlibat dari semua aspek kehidupan, bahkan politik, dan gerakan Islam harus bersatu”.

Partai An-Nur diakui sebagai partai resmi setelah mereka memperoleh lisensi pada juni 2011, dipimpin oleh Emad Abdel Ghaffur.¹⁹ Akan tetapi ketika pada september 2012, Ghoffur dikeluarkan dari An-Nur, kemudian internal An-Nur kembali untuk melakukan pemilihan ketua partai akan tetapi Ghoffur mengundurkan diri dari An-Nur dan membuat partai lagi yang bernama “Watan Party”.

¹⁹ *jadaliya.com*” Jadaliya diakses pada tanggal 19 Oktober 2013

Melihat sejarah yang cukup pendek atas terbentuknya partai tersebut, memiliki ciri khas dalam ideologi pergerakan dan pandangan terhadap demokrasi sendiri. Sehingga ketika adanya kudeta Mursi, mereka menganggap bahwa Mursi atau dari pihak Ikhwanul Muslimin untuk bisa “legowo” turun dari jabatannya selama kurang lebih satu tahun. Pandangan tersebut menurut An-Nur bahwa mereka mendukung kudeta tidak lain dan tidak bukan untuk menekan aksi kekerasan antara oposisi sipil yang menentang Mursi.

Sehingga ketika rezim Mursi berjalan sampai terjadinya kudeta, Partai An-Nur yang berbasis salafi ini tidak menghiraukan ketika saudaranya dari Ikhwanul Muslimin dibantai kurang lebih 54 orang tewas, akan tetapi sampai detik ini, dari pihak An-Nur belum menyatakan dukungan untuk kembalinya Muhammad Mursi berkuasa.²⁰

C. Partai Demokratik Nasional (PDN)

Partai Demokratik Nasional atau dalam bahasa Arab disebut *Al-Hizb Al-Watany Ad-Dimuqraty*, atau disebut *Al-Hizb al-Watany* yang artinya Partai Nasional atau Partai Demokratik Nasional Mesir. Partai Politik ini didirikan oleh Presiden Anwar Sadat pada tahun 1978.²¹ Mulai eksisnya partai ini memiliki segudang kekuasaan yang kental di dalam Pemerintahan Mesir. PDN memegang kekuasaan yang tidak terbantahkan dalam politik negara.

²⁰ Bbc.uk. *News world, Middle east*. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2013

²¹ Arafat, Alaa al-din 2009, Mubarak, *Kepemimpinan Masa Depan Demokrasi Mesir*. Palgrave Macmillan, Page 14.

Partai Demokratik Nasional (PDN) adalah Partai yang kental dengan otoriter sejak awal berdirinya. Latar belakang partai ini asal muasalanya terlahir dari Partai Uni Sosialis Arab (PUSA), bekas partai yang berkuasa tunggal sejak tahun 1962, dan Partai Demoktarik Nasional lah sebagai penerus organik Partai Uni Sosial Arab (PUSA). Namun Partai Demokratik Nasional selama berjalan dalam tubuh pemerintah Mesir sedikit berbelok haluan menjadi Partai yang sangat Otoriter, Moderat dan Sekular.²²

Setiap diadakanya pemilu di Mesir, Partai yang berkuasa ini selalu membuat ke'curangan', semua institusi didalam negara tersebut wajib memilih partai tersebut, sehingga dalam penyelesaian suat kebijakan sangat kental dengan nepotisme dan otoriter. Sistem pemilu di Mesir dimana Partai Demokrat Nasional dioprasikan untuk memenangkan dalam pemilu dan menghasilkan mayoritas di parlemen didominasi oleh anggota partai ini dan dirancang untuk berkuasa di semua tingkat pemerintahan.²³

Ketika berjalanya Partai Demokrat Nasional dalam memobilisasi semua institusi negara Mesir, banyak sekali campur tangan rezim otoriter dalam pelebagaan. Sehingga rakyat mesir pada saat dahulu sampai sekarang minimnya menikmati keadilan dan kebebasan sebagai warga negara. Pada tahun 2009 media sekretaris PDN menyatakan bahwa, menggambarkan Mesir sebagai

22. El-Mikawy, Noha 1999. *Bangunan Konsensus Dalam Proses Transisi Mesir*. Amerika Univ Kairo Press. Page. 62.

23. "Freedom House". Diakses pada tgl 17 September 2013.

“Firaun” sistem politik, dan Demokrasi sebagai alat untuk menjalankan kepemimpinan otoriter secara jangka panjang.²⁴

Munculnya partai-partai politik di Mesir pada abad ke 19 adalah refleksi dari interaksi sosial, ekonomi dan budaya serta lingkungan historis, nasional dan politik tertentu, yang mengarah pada penciptaan dan pengembangan lembaga-lembaga modern administrasi pemerintah dan masyarakat di Mesir seperti parlemen, kabinet, partai politik dan institusi negara.

Partai Demokratik Nasional merupakan Partai yang terbentuk pada tahun 1970 yang masih benih-benih dalam pembentukannya. Dalam kurang lebih 10 tahun partai ini memiliki pembentukan, organisasi, kekuasaan, dasar dan platform populer mereka. Ada pihak-pihak nasional, kelompok didominasi oleh istana kerajaan, yang lain dibentuk oleh otoritas pendudukan serta pihak-pihak ideologis tertentu yang telah diekspresikan.

Pada tahun 1907-1920, partai-partai politik sudah terbentuk di Mesir, demikian sebagai sinyal penyebaran partai politik pada saat itu. Namun mereka (rakyat mesir) masih dibatasi dalam gerak-gerik pembentukan partai karena inggris masih menduduki subordinasi Mesir untuk kekaisaran Ottoman. Kemudian pada Februari 1922 Mesir telah mendeklarasikan kemerdekaan dan dilanjutkan penerbitan konstitusi baru pada tahun 1923 yakni membangun

24. NDP insider: *Militer Akan Memastikan Perpindahan Kekuasaan*, US Department of State. 2009-07-30.

konstitusi kerajaan berdasarkan pluralisme dan prinsip-prinsip demokrasi liberal partai.

Selama pada tahun 1923-1952, Mesir menyaksikan pengalaman yang luar biasa kaya dalam praktek politik dan demokrasi, namun pengalaman Mesir tersebut merasakan adanya tekanan politik dari barat yakni Inggris. Inggris terus mencampuri urusan Mesir dan intervensi istana kerajaan dalam kehidupan politik Mesir. Sehingga pada saat itu Mesir tidak lain tidak bukan memiliki aturan yang tunggal yakni dibawah naungan aturan kerajaan Inggris.

Pada bulan Januari tahun 1953, berlakunya sebuah aturan negara yang otoritarian yakni harusnya terbentuk partai tunggal, artinya yang menguasai hanya satu partai saja sampai akhir tahun 1976. kemudian Presiden Anwar Sadat menyatakan era prularisme partai ketika dia menjabat sebagai Presiden. Selama periode ini beberapa kelompok dibentuk sebagai berikut:

1. Kelompok Pembebasan.

Pada tanggal 23 Januari 1953, Kelompok pembebasan didirikan untuk bertujuan menggantikan partai politik yang dibubarkan pada saat kerajaan Inggris menerapkan peraturan satu partai di Mesir. Kelompok ini berkepentingan untuk berevolusi menentang otoritarianisme.

2. Uni Nasional.

Pada tanggal 16 Januari 1956, Presiden Gamal Abdul Nasser menyatakan akhir periode intern dengan membuat atau memperbaharui sebuah konstitusi baru untuk referendum, Uni Nasional sebagai kelompok penting dari semua kelas rakyat Mesir.

3. Sosialis Uni Arab (Partai Demokratik Nasional)

Pada tanggal 29 Oktober 1962, Presiden Nasser mengeluarkan keputusan tentang pembentukan komite eksekutif tertinggi Uni Sosialis Arab, hukum yang didasari dan di amandemen tanggal 8 Desember 1962. pendaftaran ke dalam organisasi baru lahir diumumkan pada bulan Januari 1963. Tidak seperti pendahulunya, sosialis Uni Arab adalah sebuah asosiasi untuk kelas pekerja Mesir dan bukan pengelompokan untuk seluruh rakyat Mesir.

Sosialis Uni Arab (Partai Demokratik Nasional) mencerminkan tujuan sebagai berikut:

1. Kontrol Negara atas ekonomi nasional dan membangun sektor publik untuk melakukan proses pembangunan.
2. Menumbuhkan Nasionalisme Arab.
3. Solusi bagi perjuangan kelas, kelas bourjois dan proletar.
4. Demokrasi.

5. Komitmen terhadap agama dan kebebasan iman dan ibadah.

Setelah perang tahun 1967 dan demonstrasi besar-besaran pada bulan Februari dan Oktober tahun 1969, Mesir dalam keadaan kekacauan krisis politik, yang mengarah tentang kesejahteraan rakyat Mesir, pengangguran dan lebih menekankan terhadap pemerintah untuk membela hak-hak rakyat menuntut kebebasan berpendapat dan demokratis.

Kemudian Presiden Anwar Sadat pada bulan Agustus 1974, sadat mengajukan perubahan program kerja intern terhadap Sosialis Uni Arab. Pada bulan Juli 1975, konferensi umum Sosialis Uni Arab mengadopsi resolusi tentang pembentukan forum politik dalam serikat untuk mengusung tentang kebebasan berekspresi sesuai dengan prinsip dasar dari Revolusi Mesir.

Pada bulan Maret tahun 1976, Presiden Sadat mengeluarkan dekrit yang memungkinkan tiga forum untuk mewakili sayap kanan yakni (Organisasi Sosialis Liberal), sayap tengah (Sosialis Uni Arab) dan sayap kiri (Organisasi Persatuan Progresif Nasional). Selama pertemuan pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memberlakukan aturan Partai Politik yang telah diubah oleh Presiden Anwar Sadat pada tanggal 22 november 1976, dan disahkan pada bulan Juni 1977.

Pemberlakuan hukum secara sepihak oleh Sadat pada tahun 1977 memberikan efek yang besar bagi kekuasaan Sosialis Uni Arab (Partai Demokratik Nasional). Dan memungkinkan untuk menguatkan dalam pembentukan partai yang sedang berkuasa yakni Sosialis Uni Arab (Partai

Demokratik Nasional). Meskipun adanya pembentukan partai yang tunggal dalam “demokrasi”, Sosialis Uni Arab memiliki prinsip-prinsip yang tidak boleh bertentangan dengan agama (syariah), dan membangun persatuan nasional, kedamaian sosial, membangun sistem yang demokratis. Kemudian yang menjadi ciri khas dari terbentuknya partai ini adalah tidak memandang basis etnis, agama, asal-usul, jenis kelamin dan sebagainya.

D. Era Kepemimpinan Partai Demokratik Nasional

1. Partai Demokratik Nasional Era Presiden Nasser

Sebelum sistem politik multi partai saat ini di Mesir, ada aturan partai tunggal. Gamel Abdel Nasser menolak gagasan pembentukan partai politik alternatif pada pembentukan Republik Mesir pada tahun 1953, bukannya memilih untuk membangun sistem partai tunggal dimana kelompok-kelompok kepentingan terorganisir mengikuti garis fungsional dan terkooperasi dalam kerangka sebuah badan perwakilan resmi. Badan yang dikenal yakni Rally Pembebasan 1952-1956, Uni Nasional (UN) 1956-1962, dan (SUA) Sosialis Uni Arab 1962-1976.²⁵

Era Presiden Naser, partai politik tidak memiliki pengalaman paska kekaisaran Mesir yang mana hal demikian telah dimanipulasi oleh Inggris untuk mengamankan kebijakan yang menguntungkan bagi Inggris. Akibatnya para

25. Kassem, Maye (2004). *Politik Mesir: Dinamika Rezim Otoriter*. Lynne Reinner. Hal. 51.

pemimpin revolusioner waspada melanjutkan sistem ini. Presiden Nasser pada tahun 1957 mengatakan kepada publik:

“Dapatkah saya mengajukan pertanyaan, apa itu demokrasi? Kami seharusnya memiliki sistem demokrasi selama periode 1923-1953. Tapi apa yang baik dalam demokrasi ini kepada orang-orang kita? Saya akan memberi tahu Anda. Pemilik modal dan pemilik tanah menggunakan sistem demokrasi untuk sebagai alat dari sistem feodal, para petani akan memberikan suara mereka sesuai dengan petunjuk dari majikan mereka. Saya ingin membebaskan para petani dan buruh secara sosial dan ekonomi, saya ingin petani dan buruh mengatakan “ya” dan “tidak” tanpa ini mempengaruhi mata pencaharian mereka atau roti sehari-hari mereka. Hal ini dalam pandangan saya sebagai dasar dari kebebasan dan demokrasi”²⁶

Pembebasan Rally tidak dimaksudkan untuk melayani sebagai partai politik, meskipun untuk semua maksud dan tujuan itu berfungsi sebagai partai. Bahkan, Presiden Nasser, menekankan sebaliknya. Perspektif rezim baru adalah, untuk memanfaatkan energi semua pemimpin dan bukan menghilang melalui perdebatan parlemen. Moto pembebasan Rally adalah “Serikat, Order dan Kerja” dan hal demikian untuk menciptakan dasar populer visi misi bagi rezim baru.²⁷

Pembebasan Rally dibubarkan pada tahun 1956 dan ditata ulang sebagai partai Uni Nasional untuk mengakomodasi meningkatnya retorika pan-Arab Presiden Nasser. Pergeseran ini bertepatan dengan pembentukan konstitusi baru dan dengan persatuan Suriah dan Mesir pada tahun 1958, yang membentuk Uni

26. Ibid. Hal: 51

27. Kassem, Maye (1999). *Dalam Guise Demokrasi: Pemerintahan Kontemporer Mesir*. Itacha Press. Hal. 41.

Arab Republik (UAR). Antara tahun 1949 dan 1955, Suriah telah menyaksikan lima perubahan kepemimpinan, pada akhir musim panas tahun 1957.²⁸

Syiria pada tahun 1950an memiliki masalah tensi politik dengan sayap partai komunis di Negara tersebut, yang menyebabkan peningkatan kekhawatiran pengambil alihan dari sayap komunis Syiria. Akan tetapi Partai Ba'ath yang memimpin pemerintahan Syiria meminta penyatuan penuh dengan Mesir yakni dengan sistem serikat Federasi antara Mesir dan Syiria. Dengan penyatuan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk menekan komunis Syiria. Kesepakatan tersebut menghasilkan pembentukan Federasi dengan Ibukotanya di Kairo, yang dikelola oleh lembaga yang sama dalam pemerintahan Mesir. Kesepakatan ini membentuk Republik Persatuan Arab dibuat pada tanggal 11 februari 1958. Uni Partai Nasional dirancang dan digunakan oleh Presiden Nasser untuk mengkooperasi aktor politik Syiria ke dalam lembaga Mesir.²⁹

Persatuan Mesir dengan Syiria terurai pada tanggal 28 September 1961, setelah kudeta militer. Para pemimpin kudeta juga mengusir semua orang mesir dari Syiria yang mana pada saat itu terjadi pergolakan politik di Syiria. Presiden Nasser percaya bahwa salah satu kegagalan Uni Arab Republik (UAR) karena tingkat reformasi sosial yang diperlukan untuk sebuah proyek yang tidak tercapai.

28. Rogan, Eugene (2009). *Arabian: A History*. Basic Books. Hal. 305-317.

29. Dessouki, Ali E. Hillal (1983). *Demokrasi di Mesir*. Universitas Amerika di Kairo Press. Hal. 150.

Oleh karena itu Nasser meningkatkan peran partai dalam kebijakannya yakni sifat sosialis yang diutamakan.

Pada tahun 1962 Nasser mengubah partainya yakni Uni Nasional menjadi Uni Sosialis Arab (USA) untuk mencerminkan perubahan dalam arahan partai tersebut sehingga aturan partai tunggal Mesir mencerminkan mobilisasi rakyat dalam wahana demokrasi Mesir yang memang tidak luput dari sistem otoritarian karena masih terpengaruhi aturan kebijakan Inggris yang ingin terus menanamkan gaya kepemimpinan kerajaan yang notabenenya sebagai aturan tunggal.

2. Partai Demokratik Nasional Era Presiden Sadat

Presiden Gamel Nasser meninggal saat memegang jabatan pada tahun 1970. Kemudian penggantinya yakni dari wakilnya yang bernama Anwar Sadat. Dia menjadi Presiden Mesir ketika sistem pemerintahan Mesir untuk lebih dekat memahami sistem multi partai, akan tetapi sistem tersebut masih belum atau jauh diimplementasikan dalam aturan partai Mesir. Pada tahun 1978, Sadat mengubah partai Uni Sosialis Arab (USA) menjadi Partai Demokratik Nasional.³⁰

Pada tanggal 2 oktober 1978, Presiden Anwar Sadat menegaskan kembali dalam sebuah pernyataanya, bahwa dia akan berkomitmen untuk membentuk pemerintahanya yang demokratis, melestarikan karakter partai dengan ciri sosialis Mesir, dan menolak teori partai tunggal dan mengakui sistem multi partai.³¹

30. *Loc. Cit. Hal. 54*

31. *Loc. Cit.*

Selain itu juga Sadat membuat kebijakan ekonomi Mesir yang baru menggabungkan pemilik modal Arab dengan teknologi Barat untuk mengolah sumber daya Mesir yang berkelimpahan dalam upaya merevitalisasi ekonomi Mesir ke arah yang lebih baik dan mampu untuk menyaingi ekonomi global pada saat itu.

Kebijakan ekonomi baru yang dibuat oleh Sadat dikenal sebagai *Al-infitah Al-Iqtisadi* (Pembukaan Ekonomi, Pasar Bebas). Kebijakan tersebut sangat didukung oleh tubuh Partai Demokratik Nasional itu sendiri sehingga pada tahun 1978 sebagai tahun bermulanya bangkitnya ekonomi Mesir. Melihat kebijakannya tersebut, sekitar 250 anggota parlemen Majelis Rakyat bergegas untuk bergabung dengan partai baru yakni Partai Demokratik Nasional.

Dr Maye Kassem dari Universitas Amerika di Kairo merangkum transisi dari Uni Sosial Arab (USA) menjadi Partai Demokratik Nasional (PDN) sebagai berikut:

“Langkah ini merupakan perubahan yang lebih baik, dimana sebagian besar anggota Partai Demokratik Nasional (PDN) adalah anggota Uni Sosial Arab (USA) yang telah dibubarkan, dengan kata lain konversi massal dari “sosialis untuk “demokrasi” ideologi tersirat tidak hanya keinginan untuk tetap dibawah perlindungan presiden langsung, akan tetapi munculnya partai baru yakni Partai Demokratik Nasional merupakan mencerminkan kepentingan konstituen dari Uni Sosial Arab (USA) yang berada di bawah Presiden Nasser sistem.³²

Adanya Komite Partai Politik (KPP) telah dibentuk untuk melaksanakan sistem multi partai di Mesir yang mana telah didominasi oleh Partai Demokratik

32. Kassem, Maye (2004) *Politik Mesir: Dinamika Otoriter Mesir*. Ithaca Press. Hal. 77.

Nasional Mesir. Akan tetapi hal ini bertujuan sebuah kerangka negara yang mana kelihatan dari luar melakukan demokrasi akan tetapi “real” sebenarnya di lapangan, pemerintahan Mesir melakukan rezim otoriter.³³

Sejak pembentukan Kabinet tahun 1978 yang diketuai oleh Partai Demokratik Nasional Mesir, pada era tersebut telah mengadakan tiga perempat kursi di Majelis Rakyat. Ideologi (PDN) masih tetap terbuka akan tetapi perlakuan konstitusi negara tersebut masih banyak pro kontra atas kebijakan yang telah diputuskan. Munculnya oposisi terhadap Sadat meningkat pada tahun 1977 dimana Sadat masih melakukan revitalisasi ekonomi Mesir, dan inisiatif perdamaian Israel dan Palestina. Dengan banyaknya penentangan dari oposisi yakni benih-benih gerakan Ikwatul Muslimin sendiri, Sadat telah memberlakukan undang-undang 95 yaitu tentang “Hukum Malu”, yang berarti menangkap oposisi dan mengkriminalisasikan lawan politik. Sadat telah menangkap kurang lebih 1000 tahanan oposisi yang selalu mengkritik pemerintahan tersebut.

Pada tanggal 6 oktober 1981 Sadat telah wafat atas pemberedelan oleh oposisi yang mana pada kejadian tersebut konstelasi politik di Mesir sangat tidak stabil dan sebagai keadaan darurat. Banyak sekali kecaman ataupun dukungan atas kematian Anwar Sadat sang Presiden Mesir tersebut. Setelah terjadinya

33. Human Right Watch. Egypt

pembunuhan, pemerintahan Mesir dan Partai Demokratik Nasional langsung menggelar rapat untuk menyiapkan pengganti Sadat.

Husni Mubarak pada saat itu sebagai wakil Presidenya telah sah menggantikan Anwar Sadat. Setelah berjalanya kepemimpinan mubarak. Mesir telah berhasil meningkatkan stabilitas ekonomi dibandingkan dengan mantan presidenya terdahulu. Partai Demokratik Nasional menjadi ikon Mesir selama Mubarak memimpin dan mulailah pada tahun 1982 mubarak telah merombak kabinet Majelis Perwakilan Rakyat. Penulis melihat rezim Mubarak sampai tahun 2011 memiliki segudang permasalahan yang besar, sehingga akan dijelaskan penulisan selanjutnya Partai Demokratik Nasional dibawah pimpinan Husni Mubarak.

3. Partai Demokratik Nasional Pada Era Husni Mubarak

Presiden Husni Mubarak dan Partai Demokratik Nasional (PDN) berkuasa terus menerus sebagai Partai Tunggal akibat masih berlakunya keadaan darurat terus menerus paska jatuhnya Anwar Sadat dan mempertahankan kebijakan dari Amerika Serikat untuk menekan potensi tumbuhnya militan Islam yang akan mengganggu perdamaian dengan Israel. Di dalam negerinya sendiri, sejumlah media termasuk oposisi ataupun beberapa pengkritiknya sering membandingkan Husni Mubarak dengan Firaun Mesir oleh karena kerasnya rezim tersebut.³⁴

³⁴*Ibid*

Pada tahun 1975, Mubarak diangkat sebagai Wakil Presiden Mesir oleh Anwar Sadat, karena saking terkesanya pada prestasi Mubarak. Inilah awal pengenalan Mubarak dengan dunia politik. Pada tahun 1981, terjadi serangan yang menewaskan Anwar Sadat. Entah bagaimana, Mubarak yang duduk persis di sebelah Anwar Sadat dalam sebuah parade militer di Kairo, 6 oktober 1981, selamat dari serangan granat dan brondongan senapan otomatis para prajurit Mesir yang tidak suka dengan kebijakan Sadat untuk membuat perjanjian damai dengan Israel.

Keberhasilan memimpin Partai Demokratik Nasional (PDN) setelah terbunuhnya Anwar Sadat seakan-akan menjadi awal mulainya kepemimpinan diktator Mesir. Diberlakukannya status darurat sampai turunya Husni Mubarak merupakan ancaman bagi Ikwanul Muslimin dan Partai Oposisi lainnya. Partai Demokratik Nasional (PDN) dibawah Mubarak telah lama menunggangi pemerintahan yang sangat korup, artinya kalangan elite dan orang-orang menengah saja yang menikmati kekayaan dan penghasilan ekonomi Mesir. Sehingga banyak terjadinya pemicu untuk terus masyarakat oposisi Mesir diantaranya Ikhwan dalam memperjuangkan keadilan.

Selama menjadi Presiden sekaligus Ketua Partai Demokratik Nasional (PDN). Mubarak memerintah dengan Diktator.³⁵ Ia menggunakan UU Darurat itu untuk membat habis lawan-lawan politik dan setiap potensi yang mengancam

³⁵ Bastian, radis. (2013). *Diktator-Diktator yang Mengguncang Dunia*. Banguntapan Jogjakarta Hal. 140

kedudukannya. UU itu memberi wewenang ekstra luas bagi polisi untuk menangkap, menahan, dan menyiksa seseorang yang diduga akan melawan pemerintah tanpa melalui proses pengadilan.

Di bawah kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan Mubarak, ekonomi Mesir mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bidang *real estate*. Namun, buah pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati golongan tertentu saja, yakni orang-orang di lingkaran dalam Mubarak dan Partai Demokratik Nasional (PDN). Kelompok-kelompok oposisi mengatakan, kartel bisnis PDN menggunakan kekuasaan mereka untuk memonopoli kemakmuran negara, sementara sebagian besar rakyat masih hidup miskin. Bahkan, majalah *The Economist* menyebutkan bahwa sekitar 40% dari total 83 juta rakyat Mesir hidup dengan penghasilan di bawah 2 dollar AS (Rp 17.800) per hari.³⁶

Karena kebijakan dan kelalaian Mubarak itu, demonstrasi massa yang memprotes kepemimpinan Mubarak di Tahrir Square sejak 25 Januari 2011 berhasil menumbangkannya pada 12 Februari 2011. Meskipun pada 1 Februari, sehari sebelumnya, Mubarak akan menggelar pemilu Presiden pada bulan September. Ia pun menjanjikan amandemen konstitusi. Tetapi, para demonstran menekanya untuk mundur secepatnya. Pada 10 Februari, beredar rumor bahwa Mubarak turun. Puncaknya, wakil Presiden Omar Suleiman mengumumkan mundurnya Mubarak melalui televisi nasional Mesir dan menyerahkan kekuasaannya kepada Militer.

³⁶ archive.kaskus.co.id

E. Kerjasama Partai Oposisi Dalam Menggulingkan Husni Mubarak.

Kerjasama semua kalangan ketika menggulingkan Presiden Husni Mubarak banyak sekali kekacauan yang dihadapi. Ketika membangun satu masa, Ikhwanul Muslimin dan salafi berbondong-bondong mengajak Partai demokratik Nasional dan pecahannya untuk mendukung penggulingan Husni Mubarak. Penggulingan tersebut diwarnai dengan kerusuhan antara militer dan sipil sehingga banyak sekali korban di antaranya anak-anak, orang tua dan dewasa.

Berbaurnya kelompok oposisi sipil baik dari Ikhwanul Muslimin, Salafi dan Partai Demokratik Nasional menjadikan boomerang bagi kepemimpinan diktator Husni Mubarak. Ketimpangan ekonomi dan sosial menjadi sebab semua elemen masyarakat bekerjasama untuk menggulingkan Mursi. Mobilisasi Ikhwanul Muslimin pada semua masyarakat Mesir telah sukses dibangun selama berpuluh-puluh tahun dipimpin oleh sistem yang otoriter.

Kerjasama memobilisasi massa untuk segera menghentikan Mesir dari cengkraman otoriter menjadi sebuah cita-cita rakyat Mesir secara keseluruhan. Roda pemerintahan otoriter telah banyak memiliki dosa besar politik selama berpuluh tahun menggambarkan bahwa Mesir diambang kehancuran dan semakin terbelakang dalam mencapai kebebasan dan keadilan. Sehingga Ikhwanul Muslimin, Salafi dan Partai Demokratik Nasional telah bisa merasakan apa yang selama ini diderita oleh masyarakat Mesir pada umumnya. Kerjasama tersebut telah terbukti sukses dalam menggulingkan Husni Mubarak pada tahun 2011.